

ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA (STUDI PADA KOTA MANADO DAN KOTA BITUNG TAHUN 2008-2012)

NikmahAstuti Rahman, Amran Naukoko dan Albert Londah

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan
Universitas Sam Ratulangi, Manado
Email: nikmahrahman@yahoo.com*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif tentang kemampuan keuangan daerah di kota Manado dan kota Bitung dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Data yang digunakan dalaman analisis ini adalah data APBD Sulut Tahun 2008 sampai dengan 2012 . Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini Rasio kemandirian keuangan daeah, Rasio derajat desentralisasi fiskal Rasio indeks kemampuan rutin, Rasio keserasian, Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan Melihat hasil perhitungan tingkat kemampuan keuangan Kota Manado dan Kota Bitung selama periode penelitian, dapat dilihat dari tingkat kemandirian Kota Manado masih sedikit lebih unggul dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2 % setiap tahunnya, meskipun masih berada dibawah 20 % tingkat kemandirian, dibandingkan dengan Kota Bitung yang hanya mencapai 1 % tingkat pertumbuhan tiap tahun dan berada di bawah 10 % tingkat kemandirian.

Kata kunci : Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio derajat desentralisasi fiskal , Rasio indeks kemampuan rutin, Rasio keserasian, Rasio Pertumbuhan

ABSTRACT

This study is a descriptive an offinancial capability in the city area in the city of Bitung and supports the implementation of regional autonomy. The data used in this analysis in Sulut budget data from 2008 to 2012 primarily to. Analysis tools used in this study elapsed areas of financial self-sufficiency ratio, ratio of the degree offiscal decentralization of routineability index ratio, ratio of harmony, Growth Ratio. Ratio calculation results of the study showed Seeing the level offinancialability of the city of Manado and Bitung during the study period, it can be seen from the level of independence of the city of Manadoiss lightly superior to the average growth of between 2% each year, although still at 20% below the level of independence, compared to only reach Bitung City 1% per year and the growth rate is under10% level of independence.

Keywords: Fiscal capacity, local financial independence ratio, ratio of the degree of fiscal decentralization of routineability index ratio, ratio of harmony, Growth Ratio.

1. PENDAHULUAN

Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba.

Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga / organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga pemerintah membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonominya. Akan tetapi, karena sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat akuntansi pemerintahan berbeda dari sifat akuntansi perusahaan. Dengan adanya akuntansi pemerintahan maka pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, terutama kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Tujuan pemberian keuangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial.

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah.

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Anita Wulandari, 2001:17), adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan / kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya / segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk

pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yulianti (2001:22), adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kota Manado dan Bitung.

Tinjauan Pustaka

Menurut Halim (2004: 24), kinerja atau kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, dapat dilakukan dengan menganalisis:

1. Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat. Semakin tinggi PAD, semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya), begitu pula sebaliknya.
2. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Semakin elastis PAD suatu daerah, maka struktur PAD daerah tersebut semakin baik.
3. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil. Semakin tinggi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah BHPBP, maka semakin lemah derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya).
4. Upaya fiskal adalah koefisien elastisitas PAD dengan PDRB. Semakin tinggi Sumbangan Daerah (SB) maka semakin lemah derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah SB maka semakin kuat derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandiriannya).
5. Kebutuhan fiskal standar adalah rata-rata kebutuhan fiskal standar suatu daerah. Semakin tinggi Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP), maka semakin besar pula kebutuhan fiskal (*fiscal need*). Semakin rendah IPPP, semakin sedikit pula kebutuhan fiskal.

Dalam penjelasan teknis aspek, fokus, dan indikator kinerja kunci yang digunakan untuk Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Otonomi Daerah (EKPOD) yang terdapat dalam PP No. 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa: "Tujuan akhir otonomi daerah ditunjukkan dengan parameter tinggi kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam

EKPOD, IPM ini digunakan untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dipertanggung jawabkan". Dengan demikian IPM idealnya menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja daerah dilihat dan sisi *outcomes*.

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

Mamesah (1995: 16) mengemukakan bahwa keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kekayaan daerah ini sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah daerah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanan. Tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran

Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) tanggung jawab, (2) memenuhi kewajiban keuangan, (3) kejujuran, (4) hasil guna, dan (5) pengendalian (Binder, 1984: 279). Menurut Mangkoesoebroto (1999: 181), teori penerimaan dan pengeluaran pemerintah dijadikan dasar sebagai teori keuangan daerah. Teori tersebut menjelaskan bahwa penerimaan pemerintahan yang berasal dari berbagai sumber penerimaan, yaitu penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak dan penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintahan yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik pemerintah (BUMN), penerimaan dari lelang, dsb. Selanjutnya keuangan daerah harus dilaksanakan secara sehat termasuk sistem administrasinya. Dengan demikian diharapkan daerah menyusun dan menetapkan APBDnya sendiri (Azhari, 1995: 39-40).

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan peasyarat sistem pemerintah daerah.

PAD merupakan suatu pendapatan yang digali murni dari masing-masing daerah, sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 5 penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari atas pendapatan daerah dan pembiayaan, dimana sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sedangkan sumber pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus di pacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian

pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pengertian PAD menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Didalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (6) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (10) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu kelemahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah kelemahan dalam hal pengukuran penilaian atas pungutan daerah. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan. Beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai pajak (Devas, 1989)

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis-jenis pajak. a. Pajak propinsi terdiri dari: 1). Pajak kendaraan bermotor, 2). Pajak bea balik nama kendaraan bermotor, 3). Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 4). Pajak air permukaan, 5). Pajak rokok. b. Pajak kabupaten/kota : 1). Pajak hotel, 2). Pajak Restoran, 3). Pajak Hiburan, 4). Pajak Reklame, 5). Pajak Penerangan Jalan, 6). Pajak pengambilan bahan galian golongan C, 7). Pajak Mineral, 8). Pajak Parkir, 9). Pajak Air, 10). Pajak Burung Walet, 11). Pajak Bumi dan Bangunan, 12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguna.

Retribusi

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau memiliki daerah untuk kepentingan umum, karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Thee Kian Wie, 1981: 190). Menurut Suparmoko (2002: 85), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan

Dana Perimbangan

Menurut Musgrave dan Musgrave (dalam Halim, 2004: 191-192) ada tiga fungsi utama pemerintah dalam pembangunan yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dengan lahirnya UU Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari peranan pemerintah dalam hal fungsi distribusi yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, yang diberikan kepada daerah, dengan maksud untuk memenuhi keterbatasan keuangan daerah dalam menjalankan administrasi pemerintah dan pembangunan (Halim, 2004: 191-192).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (19), (20), (21), dan (23), dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

1. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

- desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak yang meliputi hasil PBB, BPHTB, PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
2. Bagi hasil sumber daya alam, yang meliputi sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi.
 3. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 183)
 4. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 164 ayat (1), lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Sementara itu, pendapatan dana darurat merupakan bantuan pemerintah pusat melalui APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu, seperti bencana alam yang tidak dapat ditanggulangi oleh APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu ditetapkan dengan peraturan presiden.

Sementara itu, besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh menteri keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri dalam negeri dan menteri teknis terkait. Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawab penggunaan dana darurat diatur dalam peraturan pemerintah.

Peneliti Terdahulu

Yanuar Frediyanto dalam *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah Kebijakan Otonomi Daerah* menganalisis penerimaan PAD dan kemampuan keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. analisis deskriptif, analisis *Mann-Whitney U*, dan metode kuadran. Hasil penelitian adalah (1) ada perbedaan penerimaan daerah yang signifikan antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah, kecuali rasio PAD. Setelah otonomi daerah, pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi. Meski demikian, peningkatan penerimaan PAD tidak secara otomatis meningkatkan kontribusi PAD dalam APBD. (2) Ada perbedaan kemampuan keuangan daerah yang signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah, kecuali indeks share. Pemerintah daerah pada era otonomi daerah mampu meningkatkan penerimaan PAD. Meski demikian, meningkatnya penerimaan PAD belum memberikan kontribusi yang besar dalam APBD. (3) Sebelum otonomi daerah diketahui bahwa sebagian besar (88,57%) daerah memiliki kemampuan keuangan yang rendah, sehingga masih mengandalkan dana dari pusat untuk membiayai belanja modal. Kondisi tersebut masih berlangsung sampai sesudah otonomi daerah, bahkan jumlah daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerahrendah meningkat (dari 88,57% menjadi 91,43%). Peneliti sebelumnya meneliti variabel yang sama. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis deskriptif, Mann-Whitney U, sedangkan peneliti hanya menggunakan analisis deskriptif

Ana Prihatiningsih, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Surakarta*. Untuk mengetahui Kemampuan keuangan daerah di Kota Surakarta beserta tingkat kemandiriannya metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Adapun alat analisisnya adalah DDF, DOF, Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya/Posisi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah serta Rasio Kemandirian Daerah. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari tahun 2003-2008 pendapatan Kota Surakarta terus meningkat, tetapi peningkatan ini juga disertai dengan peningkatan jumlah belanja daerah (kecuali pada tahun 2004) sehingga pada akhirnya pada tahun 2008 terjadi defisit anggaran. Ini disebabkan karena prosentase peningkatan belanja lebih besar daripada prosentase peningkatan pendapatan daerah. Adapun jika dilihat dari hasil analisis kuantitatifnya, dapat disimpulkan bahwa Kota Surakarta belum mampu secara keuangan dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Ini terlihat dari masih rendahnya proporsi PAD terhadap TPD dari tahun 2003-

2008, dengan rerata sebesar 15,56%. Perhitungan rasio kemandirian Kota Surakartamenunjukkan hasil rerata sebesar 20,52%. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kota Surakarta memiliki pola hubungan instruktif, dimana ketergantungan finansial terhadap pemerin tah pusat masih sangat tinggi.

Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian Analisis perbandingan kemampuan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara studi pada Kota Manado dan Kota Bitung dirumuskan sebagai berikut diduga kemampuan kinerja keuangan Kota Bitung lebih unggul dari Kota Manado.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Mohammad Nazir (2003:54) adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini :untuk membuat deskriptif / gambaran, melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselediki. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan kemampuan keuangan daerah di kota Bitung dan kota Manado dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Obyek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Manado, dan Kota Bitung Bitung.

Data Dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan di dalam penelitian ini adalah data kuantitatif mengenai APBD dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kota manado dan kota bitung. Data tersebut juga merupakan data runtun waktu (time series), yaitu data yang disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Sumber data di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara berupa data anggaran dan realisasi meliputi belanja daerah, PDRB, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DBH, dan PAD. dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Provinsi Sulawesi Utara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur maupun buku-buku yang menjadi rujukan relevan untuk penelitian. Data-data juga diperoleh dari instansi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, Dinas Pendapatan daerah Sulawesi utara dan Biro Keuangan setda Provinsi Sulawesi utara.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan baik berupa dokumen, catatan-catatan, arsip, maupun artikel. Data yang didapatkan kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian ini. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data APBD kota manado dan kota bitung. Data tersebut meliputi belanja daerah, PDRB, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DBH, dan PAD. Periode data yang diambil dimulai pada tahun 2008 hingga tahun 2012. Data –data tersebut didapatkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara.

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Deskriptif komparatif adalah suatu jenis metode penelitian yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor terjadinya atau munculnya fenomena tertentu (Mohammad Nazir, 2003:58).

Data yang berasal dari APBD kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Widodo, 2001 : 262).

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi resiko kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal atau otonomi Fiskal Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam tabel III.I adalah sebagai berikut (Anita W, 2001 : 22):

Tabel 1 Skala Interval DerajatDesentralisasi Fiskal

%	KemampuanKeuanganDaerah
0,00-10,00	SangatKurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	SangatBaik

Sumber : AnitaWulandari (2001: 22)

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF : \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100 \%$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t : Total PAD Tahun t

TPD_t : Total Pendapatan Daerah Tahun t

Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin yaitu : Proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat (kuncoro, 1997 : 9). Sedangkan dalam menilai Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dengan menggunakan skala menurut Tumilar (1997 : 15) sebagaimana yang terlihat dalam table III.2 sebagai berikut (Anita W, 2001 : 22)

Tabel 2 Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

%	KemampuanKeuanganDaerah
0,00-20,00	SangatKurang
20,01-40,00	Kurang
40,01-60,00	Cukup
60,01-80,00	Baik
80,01-100	SangatBaik

Sumber : AnitaWulandari (2001: 22)

Indeks Kemampuan Rutin dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IKR : \frac{PAD}{Total\ Pengeluaran\ Rutin} \times 100\%$$

Keterangan :

IKR : Indeks Kemampuan Rutin

PAD : Pendapatan Asli Daerah

Rasio Keserasian

Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio keserasian ini dapat diformulasikan sebagai berikut (Widodo, 2001 : 262) :

$$Rasio\ Belanja\ Rutin : \frac{Total\ Belanja\ Rutin}{Total\ Belanja\ AP\ BD}$$

$$Rasio\ Belanja\ Pembangunan : \frac{Total\ Belanja\ Pembangunan}{Total\ Belanja\ APBD}$$

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, total pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan (Widodo, 2001 : 270) :

Rumus yang digunakan adalah :

$$r : \frac{Pn - Po}{Po} \times 100\%$$

Keterangan :

Pn : Data yang dihitung pada tahun ke-n

Po : Data yang dihitung pada tahun ke-0

r : Pertumbuhan

Apabila semakin tinggi nilai PAD , TPD dan Belanja Pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya. Selanjutnya jika semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan Belanja Rutin yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu

mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang berikutnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Manado

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{sumber Pendapatan Dari Pihak Ekstren}} \times 100$$

Tabel 3 Penghitungan Tingkat Kemandirian Kota Manado

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Total Pendapatan dari pihak ekstren	506.552.630.955	588.174.469.624	574.764.853.930	582.132.380.202	721.515.993.124
Pendapatan Asli Daerah	54.715.561.525	73.898.733.040	72.404.996.767	90.828.438.199	134.721.720.942
Rasio Kemandirian	10.80 %	12.56 %	12.59 %	15.60 %	18.67 %

Sumber : Realisasi APBD Kota Manado (data diolah)

Jika melihat Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa kota Manado setiap tahunnya terus mengalami tren positif pertumbuhan tingkat kemandirian meskipun tingkat pertumbuhannya masih amat kecil, dan hanya bertumbuh sebesar 2 % setiap tahunnya namun perlahan-lahan tingkat kemandirian kota Manado terus meningkat setiap tahunnya.

Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bitung

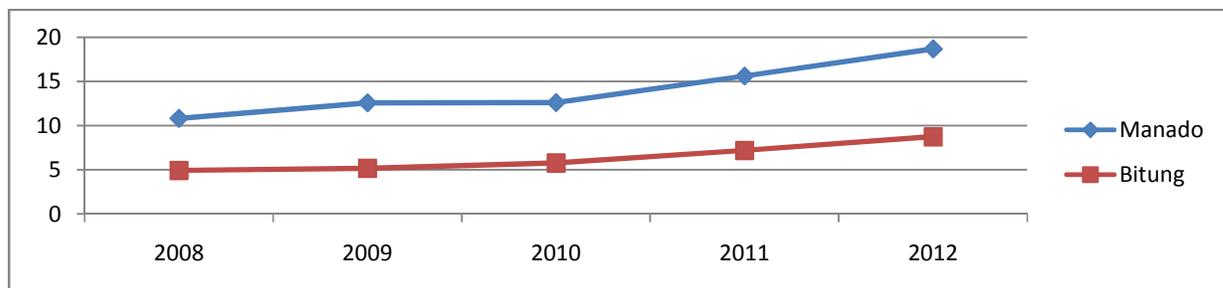
Tabel 4 Penghitungan Tingkat Kemandirian Kota Bitung

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Total Pendapatan dari pihak ekstren	331.876.337.000	338.070.740.000	327.481.918.000	353.630.749.838	440.111.231.759
Pendapatan Asli Daerah	16.344.609.743	17.456.517.690	18.875.511.960	25.384.063.796	38.435.120.911
Rasio Kemandirian	4.92 %	5.16 %	5.76 %	7.17 %	8.73 %

Sumber : Realisasi APBD Kota Bitung (data diolah)

Jika melihat Tabel 4 pertumbuhan kemandirian kota Bitung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan meskipun hanya sebesar 1 % rata-rata pertumbuhan, hal ini tentu menggambarkan kemampuan kota Bitung sebagai kota industry sekalipun belum mampu mencapai tingkat kemandirian apalagi kemampuannya masih berada di bawah 10 %.

Untuk melihat perbandingan kemandiriannya dapat kita lihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 1 Pertumbuhan Tingkat Kemandirian Kota Manado dan Bitung

Sumber : Realisasi APBD Kota Manado (data diolah)

Dalam Grafik diatas dapat dilihat bahwa, ketergantungan Kota Manado dan Bitung akan bantuan dari pemerintah pusat masih amat tinggi, bahkan pada awal tahun penelitian tingkat kemandirian kota Manado berada di tingkat 10 % sedangkan Kota Bitung Berada di angka 4 %.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemampuan keuangan Kota Manado dan Bitung terus mengalami peningkatan, namun hal ini belum signifikan karena tingkat pertumbuhan yang terjadi di dua kota tersebut hanya berkisar 1-2 % setiap tahunnya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kemampuan Kota Manado maupun Kota Bitung masih amat rendah karena masih berda di bawah angka 25,1 %, yang mengacu pada standard kemandirian Departemen Dalam Negeri, hal ini mengindikasikan kedua kota tersebut harus bisa meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi produktif mereka.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100$$

Tabel 5 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Manado 2008-2012 (Ribu Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan keuangan
2008	54.715.561.525	561.268.191.480	9,7 %	Sangat kurang
2009	73.898.733.040	662.074.202.665	11,1 %	Kurang
2010	72.404.996.767	647.169.850.697	11,1 %	Kurang
2011	90.828.438.199	672.960.863.401	13,4 %	Kurang
2012	134.721.720.942	899.152.955.866	14,9 %	Kurang
Rata –Rata			12.22	Kurang

Sumber : Laporan APBD BPS Kota Manado Tahun 2008 – 2012 (Data diolah)

Apabila melihat hasil yang ditunjukkan dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio Desentralisasi fiskal yang dimiliki oleh Kota Manado masih amat kecil dan masih masuk dalam kategori kurang mampu dalam membiayai rumah tangganya sendiri.

Tabel 6 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Bitung 2008-2012 (Ribu Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan
2008	16.344.609.743	369.257.878.870	4.42 %	Sangat kurang
2009	17.456.517.690	396.781.312.145	4.39 %	Sangat kurang
2010	18.875.511.960	446.598.045.913	4.22 %	Sangat kurang
2011	25.284.063.796	490.636.327.652	5.15 %	Sangat kurang
2012	38.435.120.911	555.570.392.064	6.91 %	Sangat kurang
Rata –Rata			5.01 %	Sangat kurang

Sumber : Laporan APBD BPS Kota Manado Tahun 2008 – 2012 (Data diolah)

Di dalam tabel 6 diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa kemampuan kota Bitung dalam membiayai rumah tangga mereka masih amat kurang, karena hanya berada di kisaran 4-6 persen setiap tahunnya, hal ini tentu tidak lepas dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih amat kecil jika dibandingkan dengan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Rasio Indeks Kemampuan Rutin

$$\text{Index Kemampuan Rutin} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah (PAD)}}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100$$

Tabel 7 Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kota Manado 2008-2012

Tahun	PAD	Pengeluaran Rutin	IKR	Kemampuan Keuangan
2008	54.715.561.525	306.409.745.013	17,85 %	sangat kurang
2009	73.898.733.040	347.693.423.895	21,25 %	Kurang
2010	72.404.996.767	424.994.024.741	17,03 %	sangat kurang
2011	90.828.438.199	475.460.069.159	19,10 %	sangat kurang
2012	134.721.720.942	554.781.774.977	24,28 %	Kurang
Rata-Rata			22,4 %	Kurang

Sumber : Laporan APBD BPS Kota Manado Tahun 2008 – 2012 (Data diolah)

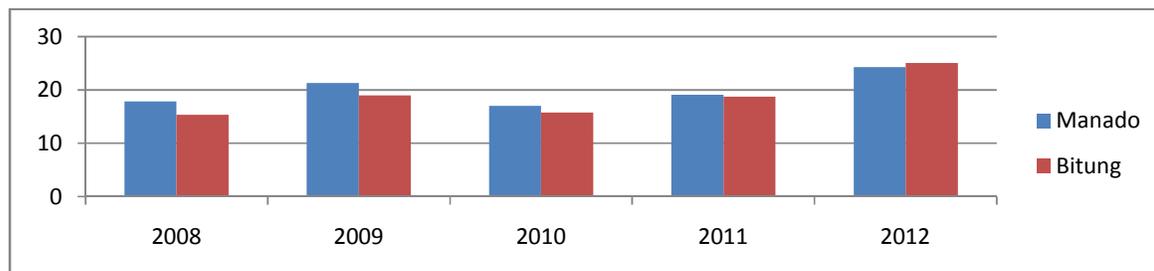
Melihat Hasil yang ditunjukkan oleh perhitungan rasio kemandirian kemampuan Rutin yang ditunjukkan dalam tabel 3.5 dapat diketahui bahwa kemampuan pemerintah Kota Manado dalam membiayai pengeluarannya masih kurang, dan sebagian besar pengeluaran yang dilakukan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 8 Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kota Bitung 2008-2012

Tahun	PAD	Pengeluaran Rutin	IKR	Kemampuan Keuangan
2008	54.715.561.525	356.912.096.944	15.33 %	Sangat Kurang
2009	73.898.733.040	388.847.382.514	19.00 %	Sangat Kurang
2010	72.404.996.767	458.915.755.253	15.77 %	Sangat Kurang
2011	90.828.438.199	483.991.924.455	18.76 %	Sangat Kuarang
2012	134.721.720.942	536.645.556.073	25.10 %	Kurang
Rata-Rata			18.79 %	Sangat Kurang

Sumber : Laporan APBD BPS Kota Bitung Tahun 2008 – 2012 (Data diolah)

Dalam Tabel 8 juga menunjukkan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung untuk membiayai pengeluaran rutinnya hanya berada di kisaran 18 % setiap tahunnya, hal ini tentu menunjukkan bahwa topanan dana dari pemerintah pusat masih amat diperlukan kota Bitung.



Grafik 2 Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kota Manado dan Kota Bitung

Sumber : Laporan APBD BPS Kota Bitung Tahun 2008 – 2012 (Data diolah)

Dalam grafik 3.2 diatas dapat diketahui bahwa tingkat kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado dan Kota Bitung dalam membiayai pengeluaran rutinnya masih amat tergolong rendah, namun dapat jika diambil perbandingan dapat dilihat Kota Manado Sedikit Lebih unggul dari Kota Bitung dalam Hal membiayai pengeluaran rutinnya.

Rasio Pertumbuhan

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

r = Pertumbuhan

P_n = data yang di hitung pada tahun ke –n (PAD tahun berjalan)

P_o = Data yang di hitung pada tahun ke – n (PAD tahun Sebelumnya)

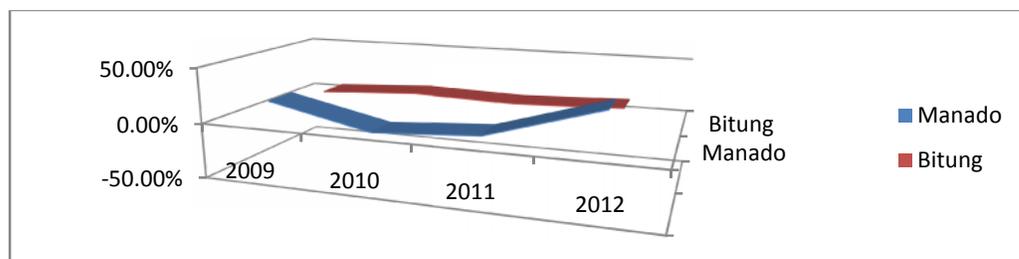
Sumber : (Depdagri, 1991)

Tabel 9 Penghitungan Rasio Pertumbuhan Kota Manado dan Bitung

Tahun	2009	2010	2011	2012
Manado	17.96 %	-2.25 %	3.98 %	33.61 %
Bitung	7.45 %	12.55 %	9.86 %	13.23 %

Sumber : Laporan APBD Kota Manado dan Bitung (data diolah)

Melihat tabel 9 diatas dapat diketahui seberapa besar pertumbuhan total pendapatan Kota Manado dan Kota Bitung setiap tahunnya, diatas dapat terlihat, pertumbuhan yang terjadi di Kota Manado cenderung tidak stabil bahkan dapat dilihat pada tahun 2010 Kota Manado mengalami penurunan bukannya pertumbuhan dalam total pendapatannya, hal ini mengindikasikan pengalokasian anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat mengalami penurunan, jika berkaca pada hasil penghitungan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 3 Rasio Indeks Pertumbuhan Kota Manado dan Kota Bitung

Sumber : Laporan APBD BPS Kota Bitung Tahun 2008 – 2012 (Data diolah)

Merujuk pada gambaran yang ditampilkan grafik di atas dapat ditarik kesimpulan, pertumbuhan di Kota Manado cenderung lebih beragam dan tak terduga karena walaupun mengalami penurunan sebesar 2 % pada tahun 2010 namun pada tahun selanjutnya mengalami pertumbuhan kembali sebesar 9 % dan kemudian pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan yang signifikan dan mengalami pertumbuhan hingga mencapai angka 33 %, sedangkan Kota Bitung mengalami pertumbuhan yang stabil pada angka rata-rata 10 % setiap tahunnya.

Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian berdasarkan Rasio Pertumbuhan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, dan Rasio Kemandirian, dapat dilihat secara jelas bagaimana kemampuan Desentralisasi Fiskal yang dimiliki Kota Manado serta Kota Bitung Pasca Otonomi Daerah Sejak 2008-2012 masih berada dalam tingkatan kurang mampu dalam mengelola keuangannya, hal ini dapat tergambar jelas dari tingkatan pencapaian yang berhasil didapatkan kedua kota tersebut dalam hal mendapatkan PAD guna membiayai pengeluaran yang masih amat kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan kedua kota yang sebagian besar masih merupakan dana transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 10 Hasil Penelitian dan Perbandingan Kota Manado-Bitung

Tahun	Rasio kemandirian		Rasio derajat destralisasi fiskal		Rasio index kemampuan rutin		Rasio pertumbuhan	
	Kota manado	Kota bitung	Kota Manado	Kota Bitung	Kota Manado	Kota Bitung	Kota Manado	Kota Bitung
2008	10.80%	4.92%	9.7%	4.42%	17.85%	15.33%	-	-
2009	12.56%	5.16%	11.1%	4.39%	21.25%	19.00%	17.96%	7.45%
2010	12.59%	5.76%	11.1%	4.22%	17.03%	15.77%	-2.25%	12.55%
2011	15.60%	7.17%	13.4%	5.15%	19.10%	18.76%	3.98%	9.86%
2012	18.67%	8.73%	14.9%	6.91%	24.28%	25.10%	33.61%	13.23%

Kurangnya pendapatan pemerintah daerah dari sektor-sektor utama seperti pajak dan retribusi tentu merupakan efek dari kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah itu sendiri, untuk meningkatkan perekonomiannya namun hal ini yang juga tidak luput dari kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Untuk itu perlu adanya terobosan dari pemerintah di kedua Kota baik Bitung maupun Manado untuk membuka sektor-sektor ekonomi produktif yang baru, maupun meningkatkan kinerja sektor-sektor ekonomi yang sudah ada guna meningkatkan PAD yang secara otomatis akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah.

4. KESIMPULAN

Melihat hasil perhitungan tingkat kemampuan keuangan Kota Manado dan Kota Bitung selama periode penelitian, dapat dilihat dari tingkat kemandirian Kota Manado masih sedikit lebih unggul dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2 % setiap tahunnya, meskipun masih berada pada dibawah 20 % tingkat kemandirian, dibandingkan dengan Kota Bitung yang hanya mencapai 1 % tingkat pertumbuhan tiap tahun dan berada di bawah 10 % tingkat kemandirian.

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan melalui berbagai analisis rasio, didapati bahwa kemampuan Kota Manado dan Bitung masih amat kecil dan tergolong kurang mampu untuk membiayai pengeluaran rutin yang dilakukan, hal ini dikarenakan tingkat kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menopang total pendapatan daerah masih berada pada tingkatan di bawah 20 % dan pertumbuhan yang hanya mencapai 2 % per tahun menyebabkan sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP YKPN.
- Anita Wulandari. 2001. *Kemampuan Keuangan Daerah*. Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara
- Hadari Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM Press.
- Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mudrajat Kuncoro. 1997. *Kkonomi Pembangunan : Teori, masalah-masalah dan kebijakan*. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Slamet Munawir. 1995. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- UU RI. 2004. Undang-UndangRipublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- UU RI. 2004. Undang-UndangRipublik Indonesia Nomor 3 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- UU RI. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- (<http://pesonamdo.wordpress.com/keadaan-umum-kota-manado/>)
- (http://www.bitung.go.id/index_.php?m=tentang_bitung&src=letak_geografis)